



## BPK Beri Predikat Wajar Tanpa Pengecualian

### ■ Pengantar Nota Keuangan APBD Ketapang

KETAPANG, TRIBUN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketapang 2014 saat Sidang Paripurna DPRD Ketapang, di aula gedung DPRD Ketapang Senin, (6/7).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ketapang, Budi Matheus SPd didampingi wakil-wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir SH dan Qadarni SE. Serta dihadiri Forkopimda, SKPD serta Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Teks pidato Bupati Ketapang, Henri-

kus yang dibacakan Plt Sekda Ketapang, Drs H Mansyur mengatakan penyampaian rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pihak eksekutif untuk disampaikan kepada DPRD tentang pelaksanaan APBD Ketapang 2014.

"Rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merupakan tanggung jawab moral eksekutif selaku pemegang mandat pelaksana anggaran daerah," kata Mansyur.

Sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan pemeriksaan yang hasilnya di-

sampaikan pada 3 Juli 2015. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014, mendapat pernyataan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Hal ini berarti bahwa Secara umum laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun anggaran 2014 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan," jelasnya.

Adapun realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014, sebesar Rp 1.546.921.315.879,89. Sementara realisasi belanja daerah tahun anggaran 2014, sebesar Rp 1.577.793.986.138,48. (\* /bnd)